



Fokki Minta Surat Suara Dibuka

KPU Sebut Harus Ada Dasar Jelas

YOGYA, TRIBUN - Jumlah surat suara tidak sah yang mencapai 14 ribu menjadi salah satu di antara banyak alasan tim pemenangan paslon Wali Kota Yogyakarta nomor urut 1 Imam Priyono-Achmad Fadli (IP-AF) untuk mendesak KPU Kota Yogyakarta membuka seluruh kotak suara yang ada. Namun KPU menegaskan, pembukaan kotak harus berdasarkan dalih yang sesuai ketentuan.

Dipimpin oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapil) DPC PDIP Kota Yogyakarta, Fokki Ardianto, ratusan massa dan simpatisan paslon nomor urut satu pada Sabtu (18/2) berkumpul di Rumah Aspirasi. Mereka berkumpul dan para saksi tempat pemungutan suara (TPS) menyuarakan testimoninya saat proses penghitungan surat suara di tiap TPS.

"Di sini kami kumpul dari berbagai lintas sektor bertujuan mengamankan surat suara yang rusak, apakah itu konteksnya memang rusak atau ada *human error*. Target kami, apapun hasilnya, seluruh suara rakyat harus diamankan," ujar Fokki.

Ia meminta KPU Kota Yogyakarta untuk membuka seluruh kotak suara yang ada di 794 TPS. Surat suara yang rusak bisa terindikasi ada yang sebenarnya sah namun dinilai tidak sah, entah



TESTIMONI - Seorang saksi dari PDIP saat memberikan testimoni tentang proses Pilkada 2017 di Rumah Aspirasi, Sabtu (18/2).

itu suara untuk paslon urut satu maupun dua.

"Kecurigaannya pada jumlahnya yang besar, 14 ribu. Nah apakah itu ada *human error* atau karena sosialiasi dari KPU yang tidak masif soal sah atau tidaknya surat suara ke anggota KPFS," jelasnya.

Namun Fokki enggan disebut bahwa tim paslon nomor urut satu tidak menghargai kinerja KPFS. Pembukaan kotak suara diperlukan untuk memastikan tidak terjadi *human error*, sehingga surat suara yang sah bisa terselamatkan.

"Inginnya semua dibuka untuk memastikan suara rakyat dihargai. Bukan ini menjadi tidak menghargai petugas TPS, tapi di sini kita minta kejelasan kepastian hukum, kenapa ada wilayah yang boleh dibuka kenapa ada yang tidak, kalau adil ya

harus semuanya," ungkap Fokki.

Sebelumnya, telah terjadi pembukaan kotak suara di Umbulharjo, Ngampilan, dan Kotagede. Pembukaan kotak suara setelah mendapat rekomendasi dari Panwas dan disetujui oleh kedua saksi.

Dalam pembukaan kotak suara ditemukan sebuah surat suara tidak sah yang ternyata adalah sah, sehingga menambah satu suara bagi paslon nomor urut dua. Selain itu, Fokki juga membenarkan bila saksi-saksi dari PDIP tidak ada yang menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS.

Pertanyakan alasan

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menegaskan, KPU tidak melarang adanya pembukaan kotak suara. Namun hal tersebut harus dilakukan bila ada da-

lah atau dasar yang jelas dan sesuai ketentuan peraturan Undang-undang (UU) KPU.

"Kalau minta dibuka itu dasarnya apa? harus jelas karena kami kan juga harus mempertanggungjawabkan seluruh surat suara," tutur Wawan.

Dasar tersebut bisa berupa perbedaan angka hitungan dari C1 milik KPFS dengan milik saksi. Selain itu, pembukaan juga harus mendapat rekomendasi dari Panwas. "Sejauh ini kami tidak menerima rekomendasi dari Panwas sehingga tidak semudah itu kami membuka kotak suara," sebutnya.

Terkait jumlah surat suara tidak sah yang mencapai 14.356, Wawan menyebut KPU tidak mengetahui bagaimana angka tersebut bisa muncul. Angka yang muncul dalam proses penghitungan dan rekapitulasi adalah angka lapangan.

"Angka itu kan hasil penghitungan suara di lapangan, tingkat TPS dan itu sudah diawasi dan disetujui oleh semua pihak. KPU tidak mengerti bagaimana angka bisa muncul," jelasnya.

Terkait disebut sebagai lembaga yang tidak netral, Wawan justru berterima kasih karena telah dievaluasi oleh tim paslon. Namun ia menegaskan, bahwa kinerja KPU sudah sesuai dengan UU KPU dan prosedur yang berlaku. (g1)

STORY HIGHLIGHT

- Tim pemenangan paslon wali kota nomor urut 1 meminta seluruh kotak suara dibuka
- Salah satu penyebabnya adalah besarnya surat suara tidak sah yang mencapai sekitar 14 ribu
- KPU Kota Yogya menyatakan, permintaan itu harus sesuai ketentuan perundang-undangan

Harus Sesuai Prosedur

KUBU Paslon nomor urut dua, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi (HS-HP) mengingatkan KPU untuk tetap bekerja sesuai prosedur. Pembukaan kotak suara jangan dilakukan bila ada desakan atau intimidasi dari manapun.

"Kami berpesan kepada KPU untuk tetap menggunakan prosedur atau ketentuan yang ada, jangan sampai KPU terindimasi karena adanya desakan untuk membuka kotak suara," ujar Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor dua, Muhammad Sofyan, Sabtu (18/2).

Perihal pembukaan kotak suara, Sofyan menyerahkan sepenuhnya ke KPU. Ia hanya mengingatkan bila pembukaan tanpa memenuhi persyaratan sesuai perun-

dang-undangan, maka itu disebut pelanggaran.

Ia menjelaskan bahwa sejauh ini pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS dan PPK tingkat kecamatan berjalan dengan baik. Tidak ditemukan laporan kecurangan sehingga pembukaan kotak suara tidak diperlukan lagi.

Perihal saksi yang tidak ikut menandatangani berita acara penghitungan suara, Sofyan menyebut itu merupakan tindakan yang tidak menghormati kinerja KPPS dan Panwas. Sofyan mengklaim bahwa tim paslon nomor urut dua telah menghormati dengan turut serta menandatangani berita acara. (gii)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005